



Media Title	Republika		
Head Line	Pembangunan Tol Plumpang Terhambat Pembebasan Lahan		
Date	17 April 2014	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	17	Article Size	
Journalist	Halimatus Sa'diyah	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

"Pembangunan Tol Plumpang Terhambat Pembebasan Lahan"

■ Halimatus Sa'diyah

PLUMPANG — Pembebasan lahan menjadi batu sandungan pembangunan akses tol Plumpang-Cilincing yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum. Tugas pembebasan lahan diemban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertugas melakukan.

Saat meninjau pembangunan akses tol tersebut, Rabu (16/4), Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengakui proyek yang sudah dibangun sejak 2009 belum rampung lantaran terbentur masalah pembebasan lahan.

"Makanya ini mau kita selesaikan. Bulan depan rampung pembebasan lahannya," ujar bakal calon presiden yang diusung PDI Perjuangan terse-

but, Rabu (16/4).

Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Bambang Nurhadi mengatakan, jika pembebasan lahan selesai maka pembangunan jalan tol sepanjang 14 kilometer tersebut bisa diselesaikan akhir tahun ini.

Menurut Jokowi, keberadaan jalan tol Plumpang-Cilincing ini akan sangat mengurangi kemacetan yang kerap terjadi di wilayah Tanjung Priok, khususnya bagi kendaraan yang hendak masuk ke pelabuhan. Gubernur kelahiran Surakarta, Jawa Tengah, 52 tahun silam itu menyebut, saat jam sibuk, kontainer-kontainer yang akan masuk ke pelabuhan kerap terjebak macet hingga berjam-jam.

Di kesempatan itu, Wali Kota Jakarta Utara Heru Budi

Susanto mengatakan, belum disepakatinya harga tanah dengan warga membuat pembangunan tol tersebut molor hingga enam tahun. Warga Jamepa meminta harga Rp 35 juta per meter. Namun, pemerintah sudah menetapkan harga Rp 12,5 juta per meter sesuai harga pasar.

Sementara di Kali Baru, warga meminta tanah mereka dibayar Rp 10 juta per meter. Namun, pemerintah sudah menetapkan harga Rp 1,9 juta per meter. "Itu sudah harga final. Tidak ada negosiasi lagi," kata Heru saat mendampingi Jokowi meninjau lokasi pembangunan.

Menurut Heru, setelah surat penetapan harga terbit maka mau tak mau warga harus pindah. Sebab, proyek jalan tol tak bisa ditunda lagi.

■ ed: karta raharja ucu